

**IMPLEMENTASI HUKUM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN OLEH CAMAT DALAM RANGKA PENINGKATAN
TERTIB ADMINISTRASI PENDUDUK (Studi di Kecamatan Maleber
Kabupaten Kuningan)**

**Oleh:
Kharisma Bangkit Rachmawati
E1A017165**

ABSTRAK

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh camat dalam rangka peningkatan tertib administrasi penduduk di Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dengan informan 4 (empat) yaitu Camat, Kasubag Umum, Seksi Pemerintahan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan wawancara, studi kepustakaan, dan dokumenter. Pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan display kategorisasi. Dan kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan matriks data kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparative analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan tertib administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan tertib administrasi penduduk di Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dari 3 (tiga) parameter yaitu pelayanan dokumen kependudukan, penginputan data, dan sumber daya manusia (SDM). Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu dikategorikan sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Pada faktor pendorong yang termasuk yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kebudayaan. Dan faktor penghambat yang termasuk yaitu faktor masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi Hukum, Administrasi Kependudukan, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat.*

**LAW IMPLEMENTATION OF DEMOGRAPHY ADMINISTRATION
MAINTENANCE BY SUBDISTRICT HEAD FOR THE ENHANCEMENT
OF ORDERLY DEMOGRAPHY ADMINISTRATION (A Study in Maleber
Subdistrict, Kuningan Regency)**

**By :
Kharisma Bangkit Rachmawati
E1A017165**

ABSTRACT

Demography administration in Indonesia is an important thing in development, in which based on the demographic administration, we can know about the people's data and information related to the people's situation, and people's residence area condition. This research's purpose is to analyze the implementation of demography administration maintenance law by subdistrict head for the enhancement of orderly administration in Maleber Subdistrict, Kuningan Regency and factors that influence the implementation of administration maintenance law by subdistrict head for the enhancement of orderly administration in Maleber Subdistrict, Kuningan Regency. This research is a qualitative research with juridical empiric analysis as its approach, with descriptive research as its specification. This research took place in The Subdistrict Office of Maleber with 4 source people, The Subdistrict Head, General Affairs Chief, Government Section, and the Village Deliberation Agency with purposive sampling method. The data that are used consist of primary and secondary data. Interview and documentary are used for accumulating the data. The data processing use data reduction, data presentation, and categorization display, and then the data are presented using The data analysis method use the qualitative analysis with content analysis and comparative analysis. The result of the research show that the administration service for the enhancement of orderly administration in Maleber Subdistrict, Kuningan Regency haven't been well implemented yet. That could be proved with 3 parameters which are demography administration service for the enhancement of orderly demography administration, the Village Deliberation Agency in orderly demography administration and the Village Deliberation Agency in administration service. The factors that influenced law implementation of demography administration maintenance for the enhancement of orderly demography administration in Maleber Subdistrict, Kuningan are categorized as hindering factor and supporting factors. Those factors have the tendencies to support consist of law factor, law enforcer factor, facilities and infrastructure factor, cultural factor. The hindering factors are society factor.

Keywords : law implementation, demography administration, hindering factor, supporting factor.